BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Disampaikan oleh:

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Drs. H. Doli Boniara, M.Si



VISI DAN MISI
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

➢ *VISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU*

Terwujudnya Kepuluan Riau Maju, Makmur Dan Merata

➢ *MISI KE-4 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU*

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan

➢ *TUJUAN*

Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

➢ *SASARAN*

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Mewujudkan Wilayah Perbatasan Yang Kondusif dan Produktif

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan dibidang koordinasi perencanaan dan fasiltasi Kerjasama, Koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENYELENGARAKAN FUNGSI BERIKUT:



01 Penyusunan kebijakan disekretariat, bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

02 Pelaksanaan tugas dukunagan teknis disekretariat, bidang bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

03 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis disekretariat, bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENYELENGARAKAN FUNGSI BERIKUT:



04 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah disekretariat, bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

05 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

PROFIL BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

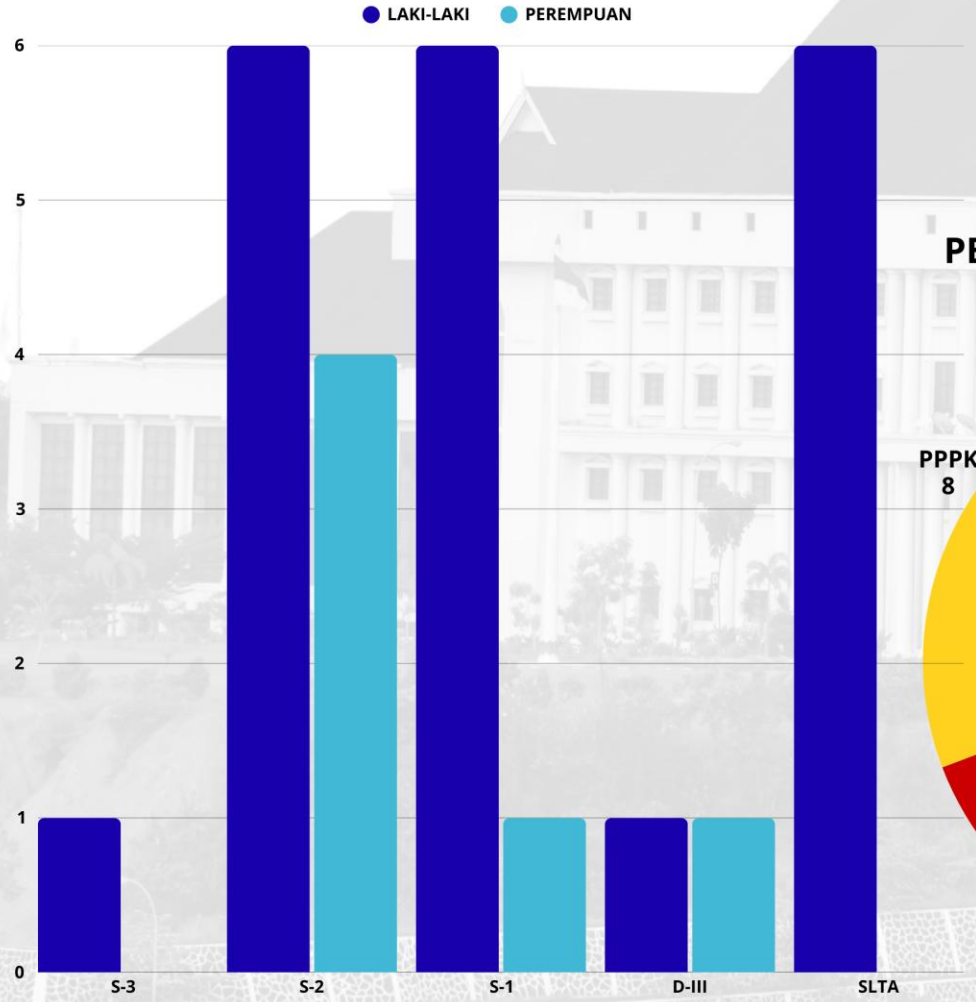
LAKI-LAKI
20 ORANG



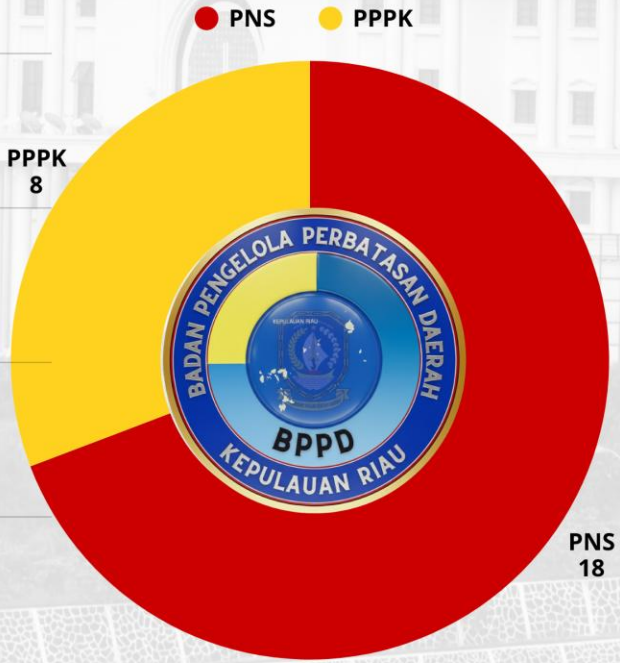
PEREMPUAN
6 ORANG

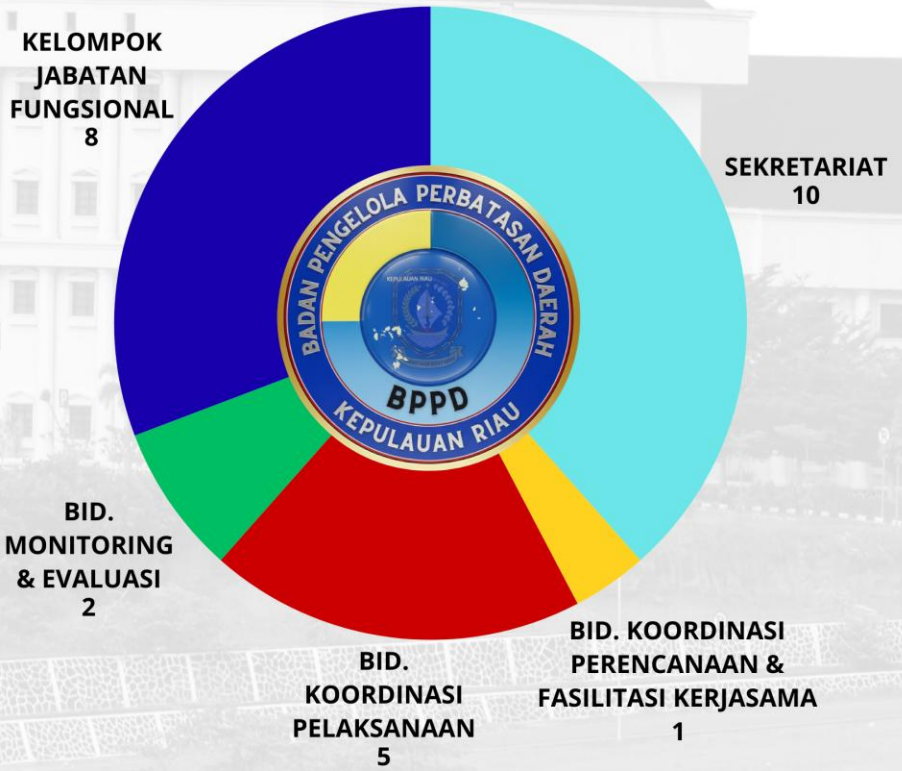
JUMLAH TOTAL : 26 ORANG

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN



PERBANDINGAN PNS DAN PPPK





Renstra dan Renja-PD Dalam Rangka Pencapaian Target dan Sasaran RPJMD Dan RKPD TA 2025

Sasaran RPJMD yang Didukung Perangkat Daerah	Indikator Sasaran RPJMD	Satuan	Target Sasaran RPJMD dan RKPD	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	%	4,30%	4,48%	100%

Isu Strategis Urusan yang Ditangani
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

URUSAN

I. Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

Isu Strategis	Tindak Lanjut
1. Belum Optimalnya Pengelolaan Batas Negara	**1. Mengkoordinasikan Pengelolaan Batas Negara**
	1.1 Rapat terbatas Kominda 2025 antisipasi kejahatan transnasional dan ketergantungan pangan serta strategi meningkatkan pangan wilayah kepri.
	1.2 Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama BIN, kantor distrik navigasi kelas 1 tanjungpinang, dan BAKAMLA terkait pembahasan progres karang singa dan isu kawasan.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	**2. Mengkoordinasikan Potensi Kawasan Perbatasan** 2.1 Rapat Sosialisasi Potensi Sektor Kelautan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan 2.2 Rapat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Dan PPKT Kabupaten Bintan,Provinsi Kepulauan Riau oleh BNPP RI Dalam Upaya Memperkuat Kapasitas Nelayan Diwilayah Perbatasan Sekaligus Menjaga Kedaulatan NKRI.

Isu Strategis Urusan yang Ditangani
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

URUSAN

I. Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

Isu Strategis	Tindak Lanjut
3. Kurangnya Infrastruktur di Kawasan Perbatasan	**3. Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan dikawasan perbatasan**
	3.1 Koordinasi terkait RENAKSI Tahun 2025 di Kabupaten Bintan 3.2 Melakukan Monitoring dan Evaluasi pembangunan tangka septik skala individual (minimal 25 kk) kelurahan pulau terong, kecamatan belakang padang (dak penugasan). 3.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Xray untuk Bandara Penumpang di Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun. 3.4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Natuna. 3.5 Melakukan Monitoring dan Evaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Kepulauan Anambas

Isu Strategis Urusan yang Ditangani
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

URUSAN
I. Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

Isu Strategis	Tindak Lanjut
4. Belum optimalnya Kerjasama Regional perbatasan negara melalui Kerjasama SOSEK MALINDO, IMT-GT	**4. Melakukan Kerjasama Regional Perbatasan negara**
	4.1 Menghadiri Persidangan Ke-18 Sekretariat Bersama (Sekber) Jawatankuasa Kerja / Kelompok Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia-indonesia (Jkk / Kk Sosek Malindo) Tahun 2025 4.2 Menghadiri Pertemuan Tim Teknik Dan Persidangan Ke-21 Jkk/Kk Sosek Malindo 2025 Johor Malaysia 4-8 Agustus 2025 4.3 Menghadiri Rapat Patkor Optima Malindo 33 Tahun 2025, Di Sp Premier Hotel Batam Yang Diselenggarakan Oleh Bakamla Ri. 4.4 Menghadiri Mesyuarat Tim Teknik Teknis Dan Sidang Ke-38 Jkk/Kk Sosesk Malindo Peringkat/ Tingkat Negeri Serawak- Provinsi Kalimantan Barat 4.5 Menghadiri Persidangan Ke-40 Jawatankuasa Kerja/Kelompok Kerja Pembangunan Sosio-ekonomi Malaysia-indonesia (Jkk/Kk Sosek Malindo Langkawi) Tahun 2025

1.1 RAPAT TERBATAS KOMINDA 2025 ANTISIPASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN KETERGANTUNGAN PANGAN SERTA STRATEGI MENINGKATKAN PANGAN WILAYAH KEPRI.





1.2 MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI BERSAMA BIN, KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 TANJUNGPINANG, DAN BAKAMLA TERKAIT PEMBAHASAN PROGRES KARANG SINGA DAN ISU KAWASAN.







2.1 RAPAT SOSIALISASI POTENSI SEKTOR KELAUTAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN





2.2 RAPAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR DAN PPKT KABUPATEN BINTAN,PROVINSI KEPULAUAN RIAU OLEH BNPP RI DALAM UPAYA MEMPERKUAT KAPASITAS NELAYAN DIWILAYAH PERBATASAN SEKALIGUS MENJAGA KEDAULATAN NKRI.





3.1 KOORDINASI TERKAIT RENAKSI TAHUN 2025 DI KABUPATEN BINTAN





3.2 MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN TANGKA SEPTIK SKALA INDIVIDUAL (MINIMAL 25 KK) KELURAHAN PULAU TERONG, KECAMATAN BELAKANG PADANG (DAK PENUGASAN).





3.3 MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN XRAY UNTUK BANDARA PENUMPANG DI RAJA HAJI ABDULLAH KABUPATEN KARIMUN.





3.4 MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KABUPATEN NATUNA.





3.5 MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS





4.1 MENGHADIRI PERSIDANGAN KE-18 SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) JAWATANKUASA KERJA / KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI MALAYSIA-INDONESIA (JKK / KK SOSEK MALINDO) TAHUN 2025





4.2 MENGHADIRI PERTEMUAN TIM TEKNIK DAN PERSIDANGAN KE-21 JKK/KK SOSEK MALINDO 2025 JOHOR MALAYSIA 4-8 AGUSTUS 2025





4.3 MENGHADIRI RAPAT PATKOR OPTIMA MALINDO 33 TAHUN 2025, DI SP PREMIER HOTEL BATAM YANG DISELENGGARAKAN OLEH BAKAMLA RI.





4.4 MENGHADIRI MESYUARAT TIM TEKNIK TEKNIS DAN SIDANG KE-38 JKK/KK SOSESK MALINDO PERINGKAT/ TINGKAT NEGERI SERAWAK-PROVINSI KALIMANTAN BARAT





4.5 MENGHADIRI PERSIDANGAN KE-40 JAWATANKUASA KERJA/KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI MALAYSIA-INDONESIA (JKK/KK SOSEK MALINDO LANGKAWI) TAHUN 2025





Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
2 Program	9 Kegiatan	24 Sub Kegiatan



Korelasi Indikator Program dengan Kegiatan yang Dilaksanakan TA 2025

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		**Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Indikator:	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Korelasi Indikator Program dengan Kegiatan yang Dilaksanakan TA 2025

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Frekuensi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan

Korelasi Indikator Program dengan Kegiatan yang Dilaksanakan TA 2025

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Korelasi Indikator Program dengan Kegiatan yang Dilaksanakan TA 2025

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Korelasi Indikator Program dengan Kegiatan yang Dilaksanakan TA 2025

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

Korelasi Indikator Program dengan Kegiatan yang Dilaksanakan TA 2025

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Program Pengelola Perbatasan	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**Jumlah Dokumen Pengawasan pengembangan/Pembangunan batas antar Negara dan Kawasan Perbatasan**
Indikator:	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dokumen hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Renaksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun
	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Presentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**
	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara
	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup Dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya Untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup Dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan

Korelasi Indikator Program dengan Kegiatan yang Dilaksanakan TA 2025

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Monitoring dan Evaluasi	**Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Kawasan Perbatasan**
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan
	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

NO	NAMA OPD	RPJMD TA 2025	RENSTRA	RKPD	APBD	RKPDP	APBDP
1	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Rp. 13.085.984.897,-	Rp. 13.085.984.897,-	Rp. 13.085.984.897,-	Rp. 8.200.979.516,-	Rp. 6.712.957.924,-	Rp. 6.712.957.924,-

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja dan Rata-rata Kinerja Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih (Anggaran – Realisasi)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Kinerja Program (%)
6.712.957.924	**6.130.169.184**	**582.788.740**	**91,32%**	**100**

Keterangan :

I. Selisih (Anggaran – Realisasi) : **582.788.740** → Terdiri Dari

1. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : **538.812.816-**
2. Sub Kegiatan Lainnya : **43.975.924,-**

Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pagu per Program	Realisasi	Selisih	Persentase Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6.506.598.126,-	Rp. 5.949.691.640,-	Rp. 556.906.486,-	91,44
2	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 206.359.798,-	Rp. 180.477.544,-	Rp. 25.882.254,-	87,46

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan/ Kendala
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Pengelolaan Perbatasan							**6.712.957.924**	**6.130.169.184**	**91,32**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)**					**ST**	**6.506.598.126**	**5.949.691.640**	**91,44**	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)		B	BB	102,64	ST				
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)		82,87	83,16	100,35	ST				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		80	86,91	108,64	ST				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**147.050.823**	**143.350.379**	**97,48**	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	ST	95.977.355	94.837.700	98,81	-
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100	ST	51.073.468	48.512.679	94,99	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5.859.119.021**	**5.320.306.205**	**90,80**	-

Lanjutan .....

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan/ Kendala
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	27	100	ST	5.651.131.021	5.140.372.205	90,96	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100	ST	207.988.000	179.934.000	86,51	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Frekuensi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200.508.142**	**194.018.991**	**96,76**	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	100	ST	13.788.309	13.233.280	95,97	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100	ST	28.190.781	25.793.736	91,50	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	ST	12.014.052	10.244.587	85,27	

Lanjutan .....

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan/ Kendala
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100	ST	18.000.000	16.500.000	91,67	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	ST	8.515.000	8.255.000	96,95	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	ST	120.000.000	119.992.388	99,99	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**5.221.551**	-	**-**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	ST	5.221.551	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**224.669.935**	**223.987.531**	**99,70**	

Lanjutan .....

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan/ Kendala
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	ST	2.182.404	1.500.000	68,73	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	12	100	ST	42.000.000	42.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	100	ST	180.487.531	180.487.531	100,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Frekuensi Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**						**70.028.654**	**68.028.534**	97,14	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	ST	67.148.654	66.794.300	99,47	

Lanjutan .....

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan/ Kendala
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	ST	2.880.000	1.234.234	42,86	-
Program Pengelolaan Perbatasan	**Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi**		**45**	**45,24**	**100,53**	**ST**	**206.359.798**	**180.477.544**	**87,46**	-
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi		**16,67**	**37,03**	**222,14**	ST				
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		**27,59**	**29,73**	**107,76**	ST				
Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Kerjasama Renduk, dan Rencana aksi Kawasan Perbatasan Perbatasan**					**ST**	**50.346.056**	**41.110.664**	**81,66**	-
Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	1	1	100	ST	24.623.208	23.264.140	94,48	-
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100	ST	25.722.848	17.846.524	69,38	-
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**						**88.686.559**	**79.913.090**	**90,11**	-

Lanjutan .....

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan/ Kendala
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100	ST	20.498.752	19.477.177	95.02	
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100	ST	21.098.257	20.496.166	97,15	
Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen	1	1	100	ST	23.285.370	20.222.861	86,85	
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup Dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya Untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup Dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100	ST	23.804.180	19.716.886	82,83	

Lanjutan .....

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan/ Kendala
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Status	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Monitoring dan Evaluasi	**Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Kawasan Perbatasan**						**67.327.183**	**59.453.790**	**88,31**	
Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100	ST	17.233.465	16.299.860	94,58	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	**Laporan**	5	5	100	ST	16.896.569	12.573.350	74,41	
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	100	ST	33.197.149	30.580.580	92,12	

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Pada LKPJ Tahun 2025

NO	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penguatan Basis Data dan Evaluasi Kinerja - Segera menyusun dan mengintegrasikan data spasial dan sosial ekonomi perbatasan, termasuk potensi SDA dan kebutuhan infrastruktur dasar. - Menyediakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi digital yang dapat diakses lintas OPD.		
		- Telah disusunnya data spasial dan sosial ekonomi perbatasan, termasuk potensi SDA dan kebutuhan infrastruktur dasar namun belum optimal	Memudahkan dalam penyusunan kebutuhan pereencanaan penganggaran di bidang perbatasan, dan memberikan informasi yang terferivikasi terhadap kondisi sosial
		- Telah dibuat aplikasi sistem monitoring dan evaluasi dengan nama border information system (Boris)	Memudahkan pelaksanaan Monev pembangunan di kawasan perbatasan

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Pada LKPJ Tahun 2025

NO	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Peningkatan Kualitas Program dan Output Nyata - Fokus pada pembangunan layanan dasar dan infrastruktur prioritas di wilayah LOKPRI, dengan pelibatan masyarakat perbatasan dalam perencanaan dan pelaksanaan. - Meninjau ulang kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif dan mengalihkannya ke program dengan dampak langsung terhadap masyarakat perbatasan.		
		- Telah dilakukan koordinasi dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan layanan dasar dan infrastruktur di Kecamatan Perbatasan Prioritas dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dengan melibatkan masyarakat langsung di kawasan Perbatasan	Meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan, terutama pada layanan pendidikan tahun 2025
		- Telah dilakukan peninjauan ulang pada kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif, dimana pada kegiatan tersebut dialihkan dengan menggunakan metode video converence antara lain Sosialisasi Potensi Sektor Kelautan, Koordinasi Sinkronisasi dan Integrasi Pembangunan Kawasan Perbatasan .	Meningkatnya informasi kepada masyarakat di kawasan perbatasan yang lebih efektif dan efesien

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Pada LKPJ Tahun 2025

NO	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Level - Memperkuat forum koordinasi perbatasan dengan melibatkan K/L, provinsi tetangga, dan pemerintah kabupaten/kota secara aktif. - Membentuk unit khusus lintas sektoral untuk sinkronisasi program RPJMN–RPJMD di kawasan perbatasan.		
		Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait baik Kementerian Lembaga, Provinsi Tetangga, dan Kabupaten/Kota, Seperti melalui kerjasama Sosekmalindo dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral	Meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan, terutama pada layanan pendidikan tahun 2025
		Telah dibentuk unit khusus lintas sektoral terkait dengan: Tim Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dari Melaka/Johor Malaysia Ke Provinsi Kepulauan Riau dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya informasi kepada masyarakat di kawasan perbatasan yang lebih efektif dan efesien

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Pada LKPJ Tahun 2025

NO	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
4	Penyelarasan Renstra Perbatasan dengan RPJMD 2021–2026 (Perda No. 2/2024) - Setiap sub kegiatan harus ditinjau ulang untuk disejajarkan dengan sasaran strategis perubahan RPJMD agar tidak terjadi program yang tidak relevan.	Telah dilakukan penyelarasan sub kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang mendukung sasaran strategis perubahan RPJMD 2021–2026	Atas hasil penyelarasan telah mampu berkontribusi terhadap nilai SAKIP OPD

TERIMA KASIH

